



Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2021-2023

Adamvin Satria Dharmawan^{1*}, Nurul Istiqomah², Putri Nurmawati³, Misfi Laili Rohmi⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email: adamvinsatriadharmawan@gmail.com, nrl.isti05@gmail.com, Putri112018@gmail.com, misfilailirohmi@metrouniv.ac.id

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Kec. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Korespondensi penulis : adamvinsatriadharmawan@gmail.com*

Abstract. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) from 2021 to 2023, the crime rate in Indonesia increased by 345,510 cases. This increase indicates social problems, particularly in the economic sector. Factors such as high unemployment, high poverty rates, and low minimum wages are the main causes driving crime. When people's basic needs are not met, the potential for deviant behavior to meet their living needs tends to increase. This study aims to analyze the influence of unemployment, poverty, and the Provincial Minimum Wage (UMP) on crime rates in Indonesia, both partially and simultaneously. The study uses a quantitative approach with secondary data sources obtained from official BPS publications. The data used is panel data, namely a combination of time series (time span) and cross-section (across regions/provinces) data for the period 2021–2023. Data analysis was performed using a panel data regression model with a Fixed Effect Model (FEM) approach after undergoing the Hausman Test. The results show that partially, the three variables—unemployment, poverty, and the UMP—have a significant influence on crime rates. Simultaneous testing also showed that collectively, these three variables significantly influence the crime rate. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) test result of 93.5% indicates that unemployment, poverty, and the minimum wage (UMP) variables are able to explain most of the variation in crime rates in Indonesia during the study period, while the remaining 6.5% is influenced by other variables not included in the model. This finding emphasizes the importance of improving the economic conditions of the community through job creation, poverty alleviation, and minimum wage adjustments as preventative measures to reduce crime rates in Indonesia.

Keywords: Crime, Panel Data, Poverty, Provincial-Minimum Wages, Unemployment.

Abstrak: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 hingga 2023, tercatat kenaikan angka kriminalitas di Indonesia sebesar 345.510 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya permasalahan sosial, khususnya dalam aspek ekonomi. Faktor-faktor seperti tingginya angka pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya upah minimum menjadi penyebab utama yang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, maka potensi untuk melakukan tindakan menyimpang demi memenuhi kebutuhan hidup cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap angka kriminalitas di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS. Data yang digunakan adalah data panel, yakni gabungan antara data time series (rentang waktu) dan cross section (lintas wilayah/provinsi) selama periode 2021–2023. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) setelah melalui Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel yaitu pengangguran, kemiskinan, dan UMP memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas. Uji simultan juga menunjukkan bahwa secara kolektif ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 93,5% mengindikasikan bahwa variabel pengangguran, kemiskinan, dan UMP mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam angka kriminalitas di Indonesia selama periode penelitian, sedangkan sisanya sebesar 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penyesuaian upah minimum sebagai langkah preventif dalam mengurangi angka kriminalitas di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan; Data Panel, Kriminalitas, Pengangguran, Upah Minimum Provinsi.

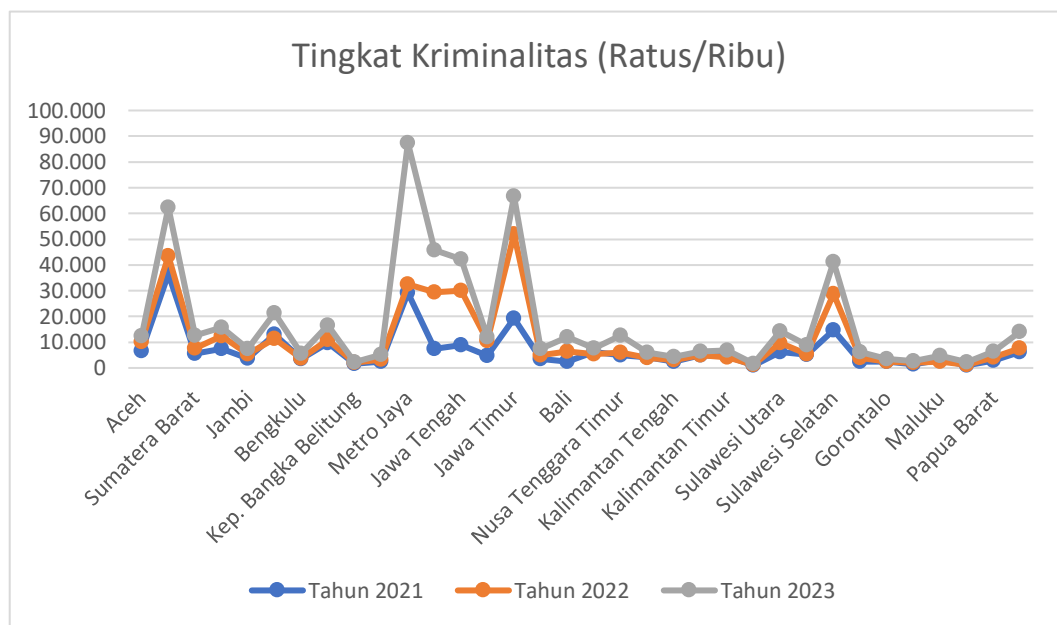
1. LATAR BELAKANG

Setiap negara memiliki tujuan dalam membangun ekonomi. Tujuan tersebut tidak terlepas dari permasalahan peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Pada awalnya pembangunan ekonomi adalah suatu kebijakan yang berguna sebagai bentuk peningkatan taraf kehidupan, pemerataan pendapatan dan membangun lapangan pekerjaan yang lebih memadai (Endang et al., 2023). Dalam upaya pembangunan ekonomi terdapat permasalahan yang sering terjadi di setiap negara terutama Indonesia. Permasalahan utama adalah lapangan pekerjaan yang tidak memadai ketika dibandingkan dengan angka penduduk yang ada. Dampaknya adalah terjadi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan (Kurnia et al., 2024).

Pengangguran dan kemiskinan adalah dampak yang diberikan atas kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Hachica & Triani, 2022). Dengan demikian menyebabkan permasalahan ekonomi yang timbul dalam masyarakat, hal ini dikarenakan setiap manusia selalu memiliki kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Pada akhirnya timbul pemikiran tindak kriminalitas di antara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang ada (Riska et al., 2024). Selain pengangguran dan kemiskinan, upah menjadi salah satu faktor dalam tindak kriminalitas yang ada dalam masyarakat. Dengan tingginya upah yang diberikan maka akan berpotensi meningkatkan minat seseorang terhadap suatu pekerjaan tersebut sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi dengan tinggi nya upah yang diberikan suatu perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja yang dimiliki nya dalam upaya penyesuaian biaya operasional perusahaan. Sehingga upah tinggi yang diberikan dapat menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu pengangguran, kemiskinan dan tindak kriminalitas (Herawati et al., 2024).

Kriminalitas adalah tindakan yang sering terjadi di berbagai dunia. Tindak kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang individu ataupun kelompok terhadap masyarakat (Ramadhani et al., 2022). Permasalahan tersebut menjadi suatu tantangan yang terus meningkat di setiap negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat kriminalitas tinggi seperti Amerika Serikat, Irak dan Kolombia, Indonesia terletak pada urutan menengah dengan kasus kriminalitas yang ada (Juni & Yollit, 2024). Dampak yang diberikan berdasarkan tindak kejahatan atau kriminalitas memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan terdapat penyebab dari terjadinya individu ataupun kelompok dalam melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas (Fitri & Hendra, 2023). Penyebab terjadinya tindak kriminalitas dapat didasari oleh faktor biologis, sosiologis dan ekonomi. Permasalahan kemiskinan termasuk dalam faktor-faktor sosiologis dan ekonomi (Septriani et al., 2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021-2023 terjadi kenaikan kriminalitas yang signifikan. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 239.481 kasus yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 terdapat kasus sebanyak 372.965 dan pada tahun 2023 terdapat kasus sebanyak 584,991. Kenaikan angka kriminalitas pada tiga tahun terakhir terbilang tinggi tetapi jika dibandingkan antara tiga tahun tersebut kenaikan pada tahun 2022-2023 adalah yang terbesar dengan angka kenaikan sebanyak 212.026 kasus yang terjadi dalam setahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2021-2022 sebesar 133.484. Angka-angka tersebut diperoleh dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Kriminalitas pada 34 Provinsi

Sumber: Statistik kriminal (2022-2021)

Data tersebut menjelaskan tingginya angka tindak kriminalitas di Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat wilayah yang telah mencapai angka 90.000 kasus tindak kriminalitas menurut kepolisian daerah. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada 2023 terjadi peningkatan angka kriminalitas yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angka-angka tersebut diduga memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta Upah Minimum Provinsi yang ada di masyarakat. Berikut ini disajikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia.



Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 34 Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2023)

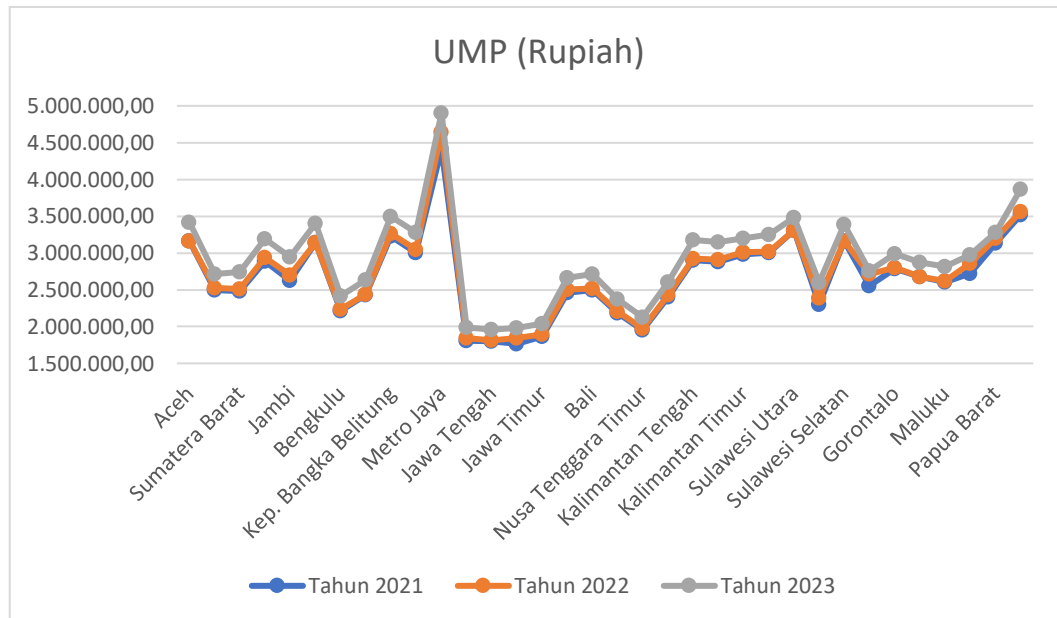
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa terjadinya penurunan TPT pada tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 angka tertinggi TPT berada pada nilai 9,91% namun mengalami penurunan sehingga pada tahun 2023 angka TPT tertinggi berada pada nilai 7,52%. Nilai tersebut berkurang sebanyak 2,39% selama dua tahun. Akan tetapi, pengurangan tersebut tidak sejalan dengan angka kriminalitas yang justru melonjak tajam. Hal yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan seperti terlihat pada grafik berikut.



Gambar 3. Penduduk Miskin pada 34 Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2023)

Berdasarkan analisis data tahun tentang penduduk miskin pada tahun 2023-2021 nilai tertinggi penduduk miskin berada pada nilai 28,86%, nilai tersebut berada pada tahun 2021 serta menjadi angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun-tahun tersebut penduduk miskin mengalami penurunan secara progresif sehingga pada tahun 2023 nilai tertinggi penduduk miskin berada pada nilai 26,03%. Nilai tersebut turun sebesar 0,83%.



Gambar 4. Grafik Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 34 Provinsi

Sumber : Ditjend. PHI dan JSK, Kemnaker RI

Rata-rata Upah Minimum Provinsi pada tahun 2021-2023 mengalami kenaikan secara progresif, pada tahun 2023 angka UMP tertinggi berada pada angka 4.901.789 sedangkan angka terendah berada pada angka 1.958.170. Angka tersebut merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis uraian grafik di atas dapat dilihat bahwa TPT dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan, sedangkan UMP mengalami kenaikan. Tren perubahan tersebut seharusnya disertai dengan penurunan angka kemiskinan, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wulan, 2023) dan (Sondang, 2024) memberikan kesimpulan bahwa pengangguran dan kemiskinan memberikan hasil yang positif terhadap kriminalitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti bertujuan untuk melihat pengaruh pengangguran, kemiskinan dan upah minimum provinsi terhadap tindak kriminalitas di Indonesia tahun 2021-2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Kriminalitas

Secara hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilarang dan dapat dikenai sanksi, seperti hukuman penjara atau denda, jika dilakukan oleh seseorang. Kejahatan mencakup berbagai tindakan, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Tindakan kriminal dianggap sebagai perilaku yang sangat bertentangan dengan norma sosial, sehingga mendapat penolakan dari masyarakat serta berakhir pada hukuman atau sanksi tertentu (Dwi, 2023).

Bidang kajian kriminologi, statistik kriminal harus dipahami sejalan dengan konsep statistik pada umumnya. Metode statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, termasuk dalam penelitian yang fokus pada sosiologi. Terdapat beragam alternatif yang berguna dalam memahami realitas kriminal, terutama karena berbagai bidang ilmu, bukan hanya hukum pidana, turut memberikan perhatian terhadap fenomena penyimpangan dan tindak kriminal dalam lingkungan sosial. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis realitas tersebut adalah melalui statistik kriminal. Meskipun statistik kriminal digunakan sebagai sarana dalam memahami kejahatan yang terjadi di masyarakat, terdapat anggapan bahwa data statistik tersebut mencerminkan seluruh kejahatan yang ada. Hal ini menyebabkan persepsi tentang pelaku kejahatan hanya terbatas pada individu yang telah dijatuhi hukuman secara resmi (Arif, 2016).

Pengangguran

Pengangguran merupakan permasalahan dalam ekonomi makro yang berdampak langsung pada kehidupan manusia dan dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar. Menurut Sukirno, Makro Ekonomi dalam (Sahrul et al., 2024) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka terjadi ketika terdapat kurangnya lapangan pekerja jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Menurut Mudhar dalam (Iswoyo, 2024) menjelaskan pengangguran merupakan kondisi ketika seseorang menginginkan pekerjaan dan masuk dalam usia kerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Sedangkan menurut Nangan dan Muana dalam (Iswoyo, 2024) mengkategorikan angkatan kerja yang telah siap dalam kemampuan serta keinginan bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif dalam upaya pencarian pekerjaan. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya taraf hidup serta menimbulkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, tidak heran jika isu pengangguran sering menjadi persoalan utama dalam perdebatan politik, di mana para aktivis politik kerap mengklaim tentang perturan yang mereka usulkan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan lapangan kerja. Untuk mengklasifikasikan

berbagai jenis pengangguran, perlu memperhatikan beberapa dimensi, yaitu: waktu kerja; intensitas pekerjaan; produktivitas. Menurut Edward dalam (Asrianti, 2017.) mengindentifikasikan pengangguran menjadi lima jenis: pengangguran terbuka; setengah menganggur (*underemployment*); tampaknya bekerja tetapi tidak sepenuhnya bekerja, (*disguised unemployment*), (*hidden unemployment*), pensiun lebih awal; tenaga kerja lemah (*impaired*); tenaga kerja tidak produktif.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah contoh permasalahan yang sering terjadi pada setiap negara di dunia. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: kemiskinan absolut dan relatif (Sri, 2019). Menurut Teori Disorganisasi Sosial (Shaw & Mackway, 1942) mengemukakan tindak kriminalitas dapat meningkat ketika batasan sosial melemah dan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah kemiskinan (Putri & Azansyah, 2024). Menurut (Simandjuntak, 1984) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kriminalitas terbagi menjadi tiga, yakni: Faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor Sosio-Ekonomis. Dalam faktor Sosio-ekonomis menjelaskan bahwa buruk suatu keadaan perekonomian suatu masyarakat akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup terutama kenaikan biaya yang meningkat dan sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan meningkatnya biaya maka akan muncul orang-orang yang memiliki pemikiran dalam melakukan tindak kriminalitas (Beby Suryani, 2023).

Kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pembuat kebijakan. Kemiskinan merujuk pada sekelompok individu ketika kelompok-kelompok tersebut tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak, akses pendidikan lanjutan, serta makanan yang sehat. Keterbatasan kualitas hidup ini menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemudian, pendapatan yang rendah membuat masyarakat miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, dan papan (Muhammad et al, 2023).

Upah Minimum Provinsi

Upah minimum merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan pekerja dengan mengubah keseimbangan kekuatan tawar-menawar pada sektor tenaga kerja. Menurut Mankiw, nilai upah dalam sektor tenaga kerja atur berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh total pekerja yang

bersedia bekerja pada berbagai tarif upah, sedangkan permintaan tenaga kerja bergantung pada kebutuhan perusahaan dalam merekrut pekerja (Alyaa, 2024). UMP merupakan upah yang berlaku pada setiap provinsi. Dalam penentuan besar kecil nya UMP ditentukan oleh gubernur dari setiap provinsi dan ketentuan tersebut berlaku pada setiap provinsi (Syafira, 2015). Peraturan dalam mengatur upah minimum provinsi yang diberikan oleh gubernur berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2025 sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan gubernur; Pasal 2 ayat (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (*Permenaker Nomor 16 Tahun 2024*, 2025). Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas adalah upah minimum pada setiap provinsi. Hal tersebut berdasarkan analisis ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dllnya. (Mika, 2023). Selain itu, upah juga mencakup tunjangan bagi pekerja atau buruh serta keluarganya sebagai kompensasi terhadap suatu pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan (Alifa et al., 2022).

METODOLOGI

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tahun yang digunakan dari 2021 - 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder yang berasal secara resmi melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan yakni regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu pengangguran (X1), Tingkat Kemiskinan (X2), dan Upah Minimum Provinsi (X3) terhadap Kriminalitas (Y). Persamaan regresi data panel dalam penelitian yakni:

$$\text{LN } Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \text{LN } X_{3it} + e_{it}$$

dimana:

Y_{it} = Kriminalitas

X_{1it} = Pengangguran

X_{2it} = Kemiskinan

X_{3it} = Upah Minimum Provinsi

LN = Logaritma Natural

β_0 = Nilai Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Error

i = Provinsi

t = Periode 2021-2023

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Menurut Gujarati (2013) terdapat tiga metode dalam meregresikan data panel, yaitu: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model. Berikut ini adalah tahapan pemilihan ketiga model tersebut.

➤ Uji Chow

Uji Chow bertujuan dalam membandingkan model regresi yang tepat antara CEM dan FEM dengan menggunakan uji F test (Chow test) dengan nilai $CEM > 0,05$ (Utami & Darmawan, 2018). Berikut hasil Uji Chow dalam penelitian ini.

Tabel 1: Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	45.579805	(18,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	182.187036	18	0.0000

Sumber: Output diolah dengan Eviews 13

Tabel 1 menunjukkan nilai Probabilitas *Cross-section* sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05). Sehingga model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menunjukkan hasil yang lebih unggul dari *Common Model Effect* (CEM).

➤ Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan dalam membandingkan model regresi yang tepat antara FEM dan REM dengan nilai $FEM < 0,05$ (Nurapih & Nanang, 2021). Berikut hasil Uji Hausman dalam penelitian ini.

Tabel 2: Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.681413	3	0.0000

Sumber: Output diolah dengan Eviews 13

Tabel 2 menunjukan nilai $F_{cross-sectional}$ sebesar $0,0000 < \alpha$ (0,05). Berdasarkan hasil uji Hausman model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menunjukkan hasil yang lebih optimal dari *Random Effect Model* (REM).

Pengujian Hipotesis

➤ Uji t (Parsial)

Menurut Sugiyono dalam (Laily & Hilmiatul, 2020) menjelaskan bahwa ketentuan uji t apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima; sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berikut hasil uji t pada penelitian.

Tabel 3: Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-			
C	28.5071			
	2	20.40541	-1.397037	0.1712
	-			
Pengangguran	0.32160			
	7	0.082662	-3.890635	0.0004
	-			
Kemiskinan	0.31338			
	6	0.111906	-2.800438	0.0083
	2.88050			
UMP	1	1.327513	2.169848	0.0369

Sumber: Output diolah dengan Eviews 13

- Berdasarkan Hipotesis Uji t pada variabel Pengangguran (X_1) didapatkan t_{hitung} 3,890635 $> t_{tabel}$ yaitu 1,983972 dan nilai signifikan 0,0004 $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini mengindikasikan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.
- Berdasarkan Hipotesis Uji t pada variabel Kemiskinan (X_2) didapatkan t_{hitung} 2,800438 $> t_{tabel}$ yaitu 1,983972 dan nilai signifikan 0,0083 $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menandakan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.
- Output Uji t pada variabel Upah Minimum Provinsi (X_3) didapatkan t_{hitung} 2,169848 $> t_{tabel}$ yaitu 1,983972 dan nilai signifikan 0,0369 $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini mengindikasi Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

➤ Uji F (Simultan)

Menurut Sugiyono dalam (Pratiwi & Lubis, 2021) menjelaskan uji simultan berguna dalam menguji pengaruh ketiga variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini.

Tabel 4: Uji F dan R2

R-squared	0.959591
Adjusted R-squared	0.935345
S.E. of regression	0.244527
Sum squared resid	2.092778
Log likelihood	13.30043
F-statistic	39.57807
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output diolah dengan Eviews 13

Nilai F Hitung sebesar $39,57807 > F$ tabel $2,697423$ dan nilai sig sebesar $0,000000 < \alpha (0,05)$. Maka berdasarkan hasil Uji F atau simultan Variabel Independen Tingkat Pengangguran (X1), Tingkat Kemiskinan (X2) dan Upah minimum Provinsi (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen Kriminalitas (Y).

➤ Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Sugiyono dalam (Halin, Wijaya, & Yusilpi, 2017) menyatakan berdasarkan hasil analisis R2 berguna untuk mengetahui besar presentase variabel *independen* secara bersama terhadap variabel *dependen* menandakan nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar $0,935345$, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran, kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi dapat menjelaskan sebesar $93,5\%$ variasi dari variabel kriminalitas. Sementara sisanya $6,5\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Analisis Persamaan Regresi

Berdasarkan olah data, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LN Yit} = 2,3 + 0,05X_1 + 0,1X_2 - 0,16\text{LN}X_3$$

Interpretasi berdasarkan persamaan regresi dapat dijelaskan seperti berikut:

- Nilai konstanta sebesar $2,3$ menunjukkan nilai asli tanpa dipengaruhi variabel Pengangguran (X1), Kemiskinan (X2) dan Upah Minimum Provinsi (X3) maka estimasi kriminalitas di Indonesia berada pada angka $2,3$.

- Nilai koefisien beta variabel Pengangguran (X1) sebesar 0,05, jika nilai variabel pengangguran (X1) meningkat, maka akan mempengaruhi kenaikan nilai variabel Y sebesar 5%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel (X1) menurun maka variabel Y akan menurun sebesar 5%
- Nilai koefisien beta variabel Kemiskinan (X2) sebesar 0,1, jika nilai variabel kemiskinan (X2) meningkat maka akan memberikan pengaruh kenaikan terhadap nilai variabel Y sebesar 10%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel (X2) menurun maka variabel Y akan menurun sebesar 10%
- Nilai koefisien beta variabel Upah Minimum Provinsi (X3) sebesar -0,16, jika nilai variabel UMP (X3) meningkat, maka akan memberikan perubahan terhadap penurunan nilai variabel Y sebesar 0,16%. Begitu pula sebaliknya, jika variabel UMP (X3) menurun 1% maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,16%

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2021-2023

Hasil pada penelitian ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Dapat diartikan bahwa ketika nilai pengangguran mengalami peningkatan maka nilai kriminalitas akan ikut mengalami peningkatan menjadi lebih besar dan sebaliknya ketika nilai tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan maka nilai kriminalitas akan menurun. Penurunan tersebut akan mendorong individu untuk tidak melakukan tindak kriminalitas dikarenakan individu-individu tersebut telah memiliki pekerjaan serta hasil yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan seperti sandang, pangan, papan. Hal ini selaras dengan penelitian (Rahmat & Cut, 2019). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2021-2023

Hasil pada penelitian ini menunjukkan tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Dapat diartikan bahwa ketika nilai kemiskinan mengalami peningkatan maka nilai kriminalitas akan ikut mengalami peningkatan menjadi lebih besar dan sebaliknya, ketika nilai tingkat kemiskinan mengalami penurunan maka nilai kriminalitas akan menurun.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sulit untuk diatasi. Kemiskinan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga menempuh cara-cara pintas yakni melakukan tindak kriminalitas. Penelitian ini sejalan dengan (Dita et al., 2021) yang menjelaskan bahwa kemiskinan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2021-2023

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Tingginya upah yang diberikan sesuai dengan tinggi rendahnya permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja. Upah yang didapat oleh individu menjadi tidak stabil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidaksesuaian upah yang diberikan dengan UMP menjadi pemicu individu dalam melakukan tindak kriminal. Penemuan ini sejalan dengan temuan (Juni & Yollit, 2024), dalam penelitiannya menemukan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Tingkat kriminal akan turun dengan naiknya Upah Minimum yang diberikan karena seseorang dapat memenuhi kebutuhannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa tingkat pengangguran, kemiskinan, dan UMP berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas berdasarkan pengujian hipotesis, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi memberikan nilai 93,5%, artinya kriminalitas dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, Kemiskinan dan UMP sebesar 93,5%. Pemerintah harus terus berupaya mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kriminal agar pelaku tindak kriminal dapat memikirkan kembali dampak yang diterima terhadap perilakunya. Keterbatasan penelitian terletak pada data yang ada serta variabel yang terbatas serta keterbatasan terhadap hasil uji yang lebih baik. Maka penelitian yang akan mendatang disarankan untuk memperluas variabel serta melakukan metode analisis yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alifa, M. A., Amatul, K., & Jenny, M. (2022). Analisis hubungan tingkat pendidikan terhadap upah rata-rata per jam kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2021. Retrieved from www.researchgate.net
- Alyaa, F. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi dan rata-rata lama sekolah terhadap peningkatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Pulau Jawa tahun 2011-2021. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arif, R. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Prespektif*, 21(2), 125-134.
- Asrianti. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Beby, S. (2023). *Kriminologi. Deliserdang*: Universitas Medan Area Press.
- Dita, K., Fivien, M., & Edy, S. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(3), 1-9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Dwi, R. A. S. (2023). Pengaruh rata-rata lama sekolah dan upah minimum terhadap kriminalitas melalui kemiskinan di Indonesia. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Endang, et al. (2023). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 328-339.
- Fitri, S. K., & Hendra, H. (2023). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap tindakan kriminal di Kabupaten Tolitoli periode 2012-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 11–20. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.81>
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 63. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11814857.00>
- Halin, H., Wijaya, H., & Yusilpi, R. (2017). Pengaruh harga jual kaca patri jenis silver terhadap nilai penjualan pada CV. Karunia Kaca Palembang tahun 2004-2015. *Jurnal Ecoment Global*, 2(2), 49–56. <https://doi.org/10.35908/jeg.v2i2.251>
- Hermawati, Asrahmaulyana, & Baso I. (2024). Perubahan angkatan kerja, tingkat upah, dan produk domestik regional bruto terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(1), 1-13.
- Iswoyo, F. (2024). Pengangguran dan mandat budaya. *REI MAI: Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.69748/jrm.v2i1.113>
- Juni, A. K., & Yollit, P. S. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedRep)*, 1(3), 312-321.
- Kurnia, et al. (2024). Analisis pengangguran terhadap tindak kriminalitas di Kota Bekasi. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(30), 223-234. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.497>
- Laily, M., & Hilmiatul, I. (2020). Pengaruh testimoni dan daya tarik Instagram terhadap keputusan pembelian: (Studi pada Lsimta Muslim Wedding). *GREENOMIKA*, 2(2), 105-113. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2020.02.2.3>

- Mika, P. Y. (2023). Pengaruh upah minimum provinsi, pengangguran, dan jumlah penduduk miskin terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara tahun 2018-2022. Universitas Negeri Medan.
- Muhammad, H. F., Masruri, M., & Pardomuan, R. S. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i1.4782>
- Nurapih, & Nanang Q. (2021). Pengaruh struktur modal, net profit margin, Return on Asset, dan Return on Equity, terhadap nilai perusahaan pada sektor industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Trend, 8(1), 35–40. <https://doi.org/10.31970/trend.v8i1.184>
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2024.
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan Ud Adli di Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan. JBM Jurnal Bisnis Mahasiswa, 121-134.
- Putri, M. A., & Azansyah. (2024). Analisis pengaruh kemiskinan terhadap tindak kriminalitas di Sumatera Utara. Human Falah, 36-50.
- Rahmat, E. F., & Cut, Z. R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, 4(3), 255-263.
- Ramadhani, S., et al. (2024). Faktor determinan tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2022. Deviance Jurnal Kriminologi, 8(2), 159-180.
- Riska, S., Syamsu, A., & Regina. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas property di Indonesia dengan pendekatan ekonomi. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 15(5).
- Sahrul, SA. N., et al. (2024). Analisis pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Sulawesi Tengah priode 2018-2022. Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah, 6(2), 203-213.
- Septriani, S., Atthoriq, W., & Winami, E. (2024). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dan pengangguran terhadap PDRB melalui kriminalitas di Indonesia. Journal Development, 12(2), 192-209. <https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.381>
- Sondang, E. S. (2024). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap kriminalitas Indonesia pada tahun 2022. Indonesia Journal Of Economics and Strategic Management, 2(2), 1621-1628.
- Sri, E. R. (2019). Pengaruh pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Syafira, M. (2015). Analisis mekanisme penetapan upah minimum Provinsi Jambi Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(3), 164-170.
- Utami, M. R., & Darmawan, A. (2018). Pengaruh DER, RoA, RoE, EPS dan MVA terhadap harga saham pada Indeks Saham Syariah Indonesia. Journal of Applied Managerial Accounting, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.910>
- Wulan, A. (2023). Pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kriminalitas Provinsi Lampung dalam prespektif Ekonomi Islam tahun 2017-2022. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.